

Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)



P-ISSN : 1411-4461

E-ISSN : 2830-7267

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

VOL 20, NO 1 (2023)



DEWAN REDAKSI

Susunan Tim Redaksi Jurnal Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)

Penanggungjawab :

Dr. Suryoto, S.Sos., MM., M.Si

Ketua Dewan Redaksi :

Drs. Taufik Purboyo, M.Si

Anggota Dewan Redaksi :

Dra. Oti Kusumaningsih, M.Si

Emiraldo Win Pazqarra, SIP, M.Si

Drs. Emilius Gudonohadi, M.Si

Johar Ma'muri, SIP, M.Si

Farida Nur Aini, SS, M. Hum

Sekretaris :

Anggara Setya Saputra, S. Sos, M. AP

Bendahara :

Ranjani, S. Sos, MPA

Reviewer :

Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, MS

Dr. Alizar Isna, M. Si

Dr. Slamet Rosyadi, M. Si

Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si

Dr. Denok Kurniasih, M.Si

Editor :

Devit Bagus Indranika, S. Sos, M. Si

Anggara Setya Saputra, S. Sos, M. AP

Johar Ma'muri, SIP, M.Si

Ranjani, S. Sos, MPA

Nikki Prafitri, S.Sos., M.Si

Alamat Redaksi/Penerbit :

Kampus Karangsalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wijayakusuma Telp. (0281) 6439889
Purwokerto 53152



Table Of Contents

DOMINASI AKTOR KEBIJAKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGANGGARAN DESA DOI: 10.56681/da.v20i1.80 <i>Shadu Satwika Wijaya, Simin Simin</i>	PDF 1-10
INOVASI PELAYANAN PUBLIK: PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN ONLINE DI KABUPATEN LEBAK DOI: 10.56681/da.v20i1.81 <i>Nikki Profitri</i>	PDF 11-24
INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM E-SAMSAT DOI: 10.56681/da.v20i1.82 <i>Teddy Rusmawan, Supardi Hamid</i>	PDF 25-38
DINAMIKA DAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA DOI: 10.56681/da.v20i1.83 <i>Rifai Rifai</i>	PDF 39-49
GOOD LOCAL GOVERNANCE MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DOI: 10.56681/da.v20i1.84 <i>Tiwi Rizkiyani</i>	PDF 50-60
IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA CORE VALUE APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERAKHLAK DOI: 10.56681/da.v20i1.85 <i>Lilis Siti Rohmah, Gerda Cendana, R. Rindu Garvera</i>	PDF 61-72
IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE POLICIES IN THE OFFICE BIMA CITY WEIGHBRIDGE RETRIBUTION OFFICE DOI: 10.56681/da.v20i1.86 <i>Muhammad Iptidayah, Taufik Irfadat</i>	PDF 73-83
PENGARUH PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi Empiris Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan) DOI: 10.56681/da.v20i1.70 <i>ALIF FARUQI FEBRI YANTO</i>	PDF 84-95
PENGARUH PROFESIONALITAS DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP CITRA LEMBAGA PADA SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KELURAHAN MANGGARAI JAKARTA SELATAN DOI: 10.56681/da.v20i1.63 <i>Khikmatul Islah, Arrafi Al Hakam</i>	PDF 96-112
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Pantai Jai-Jai Raok) DOI: 10.56681/da.v20i1.89 <i>Emilia Emharis, Rika Ramadhanti, Melliofatria Melliofatria</i>	PDF 113-121
PENERAPAN INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE PADA PERUSAHAAN PELAYARAN DI MAKASSAR	PDF 122-135



DOI: 10.56681/da.v20i1.90 <i>Ismail Ismail, Andi Dirga Noegraha, Agriani Pongkessu</i>	
TOGMOL LEADERSHIP, AGILITY, AND ADAPTABILITY OF PUBLIC SERVICES AMIDST PANDEMIC DOI: 10.56681/da.v20i1.73 <i>Listyaningsih Listyaningsih</i>	PDF 136-158
ANALISA KINERJA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN), PADA DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT, KEMENTERIAN PERTANIAN DOI: 10.56681/da.v20i1.64 <i>ratiyah ratiyah</i>	PDF 159-175
MEMBANGUN KEPEMIMPINAN DELIBERATIVE DI ERA VUCA (VOLATILITY, COMPLEXITY, AND AMBIGUTY) DOI: 10.56681/da.v20i1.87 <i>Sri Weningsih, Chamid Sutikno</i>	PDF 176-197
PENGAWASAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS PASAR SIMPANG BARU PANAM) DOI: 10.56681/da.v20i1.88 <i>Wafiratul Husna, Pivit Septiary Chandra</i>	PDF 198-213
DETERMINASI SISTEM MERIT DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS KERJA DOI: 10.56681/da.v20i1.92 <i>Diah Aryanti, Denok Kurniasih</i>	PDF 213-226
MANAGERIAL PERFORMANCE OF VILLAGE ADMINISTRATION DOI: 10.56681/da.v20i1.94 <i>Vita Mayastinasari</i>	PDF 227-237
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA WINDUAJI KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES DOI: 10.56681/da.v20i1.103 <i>Denok Kurniasih, Muhamad Yusuf</i>	PDF 238-264
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA LANTA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA DOI: 10.56681/da.v20i1.106 <i>wawan mulyawan</i>	PDF 265-272

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA WINDUAJI KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES**¹Denok Kurniasih, ²Muhamad Yusuf**¹Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto²Universitas Muhammadiyah Palangkarayadenok.kurniasih@unsoed.ac.id, m.yusuf@umpr.ac.id

ABSTRACT

The Family Hope Program is one of the program that aims to overcome public problems regarding poverty is society issued by the government which are conditionally classified as poor families in the form of social assistance as a form of social protection efforts. The purpose of this research is to study the process of evaluating the implementation of family programs in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency. This study uses a descriptive qualitative approach that can describe problems in a study through the answers to these problems. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. To test the validity of the data, researchers used a source triangulation technique, namely by checking the data that had been obtained through several sources. From the results of the analysis carried out on the Family Hope Program implemente, it could can run in accordaning to the regulations and procedures set by the relevant government. . This can be seen from the various activities carried out in Winduaji Village, Paguyangan District, Brebes Regency by PKH Facilitators, PKH Coordinators and community groups starting from meetings, disbursing, updating data to verifying commitments and towards the Family Hope Program. Aimed at the level of families who are slassified as poor can help meet the needs of people who are still minimal earning income in their respective families. However, there is a need for training and socialization regarding education on the use of assistance from the Family Hope program to build economic welfare independently for the people who belong to it, who in the future will not always depend on prograded government assistance.

Keywords; Implementation, Policy, Family Hope Program

A. PENDAHULUAN

Evaluasi kebijakan menjadi salah satu aspek yang penting dalam melihat suatu dampak keberhasilan dalam pelaksanaan suatu program

kebijakan (Lang, Jing & Yin, Runsheng. 2019). Evaluasi kebijakan bukan hanya sekedar prose untuk menilai dan melihat dampak keberhasilan dari suatu program, akan tetapi melihat bagaimana semua proses program kebijakan di laksanakan secara komperhensif. (Derrick and White, P. 2020). Suatu program dapat berhasil melalui berbagai langkah yang dikembangkan melalui bentuk kegiatan yang direncanakan secara sistematis yang memberikan warna dampak perubahan bagi masyarakat. untuk mengetahui proses program yang dilakukan dapat diketahui secara dini yaitu melalui proses evaluasi yang angat berpengaruh bagi berbagai kegiatan yang terkandung dalam program pemerintah mengenai suatu permasalahan yang terjadi (Babatunde, Binoyo. 2019). Proses evaluasi dapat dijadikan sebagai suatu upaya pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seiring dengan pelaksanaan program yang telah diimplementasikan dimasyarakat dalam mewujudkan pencapaian tujuan dari program (Aiafi, Patoae Roberts, 2020) . Berbagai infomasi dan fakta dapat ditemukan dengan adanya proses evaluasi dari hasil pelaksanaan program sehingga dengan adanya proses evaluasi secara umum dapat mengambil keputusan untuk menentukan langkah dan menganalisis data yang ada untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan kemudahan dan langkah sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan pada program pemerintah kepada masyarakat (Aiafi, Patoae Roberts, 2020).

Proses evaluasi program merupakan salah satu bentuk program yang diperuntukan dalam mengidentifikasi, mengamati dan menganalisis data yang ditemukan melalui hasil pelaksanaan program yang telah diimplementasikan sebelumnya dimasyarakat. Adapun tujuan dari proses evaluasi yaitu untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan yang ada dimasyarakat secara efektif dan efisien yaitu dengan melalui pengidentifikasian berbagai kegiatan yang sudah direncanakan dan diterapkan dalam bidang permasalahan kehidupan masyarakat (Korankye, Alex Adde. 2019). Kemiskinan menjadi salah satu bidang yang difokuskan

yang belum bisa dapat teratasi secara maksimal oleh pemerintah walupun dengan berbagai kebijakan ataupun program yang telah dilakukan dan direncanakan secara aktif dimasyarakat (Kwong, Yan Wai. 2019). Kemiskinan menjadi persoalan yang sangat rumit dan kompleks seiring dengan terus berkembangnya permasalahan ini dan terlajur besar dan kompleks yang dialami oleh masyarakat. Adanya permasalahan yang terbilang besar secara umum memperhambat kemajuan negara dalam berbagai bidang dan masyarakat secara khusus tidak dapat mencapai pada titik kesejahteraan secara merata.

Permasalahan kemiskinan terjadi benar-benar bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diselesaikan secara sendiri namun dapat dikategorisasikan ke dalam suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi dengan berbagai pihak dan mampu mendorong serta membantu dalam memecahkan permasalahan tersebut. Negara Indonesia dalam situasi seperti ini, pengendalian ataupun penanganan yang dilakukan belum bisa berdampak signifikan dalam menuntaskan kemiskinan yang tersebar diberbagai daerah. Faktor-faktor lain juga sebagai pendorong laju garis kemiskinan yang berkembang seperti peningkatan penduduk, lapangan pekerjaan yang semakin rendah dan pemenuhan kebutuhan yang semakin susah. Hal ini secara tidak langsung menghambat dari program yang dilaksanakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan. Berbagai kesulitan yang ada membuktikan betapa sulitnya dan kompleksnya permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat dalam sektor sosial kehidupan manusia. Berikut disajikan mengenai tabel angka jumlah penduduk miskin di negara Indonesia yang terjadi dari tahun 2018 – 2020.

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 - 2020

Bulan dan Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	% Jumlah Penduduk	(Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019)
Maret (2018)	25,95	9,82	
Maret (2019)	25,14	9,41	
Maret (2020)	26,42	9,78	

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen. Sedangkan pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen dan pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen (Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2019). Kemiskinan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Brebes yang mendapat julukan sebagai Kota Satria, dijuluki sebagai Kota Satria karena kota ini memiliki banyak pahlawan nasional. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel mengenai keadaan kemiskinan di Kabupaten Brebes sejak tahun 2018 – 2020, berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.

Gambar 1. Data kemiskinan di Indonesia



(Sumber: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html#>, (diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pada pukul 09.50 WIB))

Berdasarkan gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 9,78% yaitu meningkat sebesar 0,56% poin dari sebelumnya yakni pada bulan September 2019 dan meningkat sebesar 0,37% poin terhadap Maret 2019. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 26,42 juta orang, artinya meningkat 1,63 juta orang terhadap bulan September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap bulan Maret 2019. Dengan demikian kemiskinan menjadi suatu masalah yang penting hal ini dikarenakan kemiskinan menjadikan banyak masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara lebih layak. Seperti contoh dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, memperoleh pendidikan serta akses kesehatan. Menurut Soerjono Soekanto (2009:321) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok serta tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan juga diartikan sebagai keadaan dimana tidak adanya akses

terhadap kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang layak sebagai warga negara.

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) guna mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial. CCT atau disebut dengan *conditional cash transfer* di Indonesia di kenal Dengan Program bantuan tunai bersyarat telah dilakukan di beberapa negara dan cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan. Beberapa kali pemerintah melakukan penyesuaian Harga BBM sehingga masyarakat sangat misin juga haus dapat menyesuaikan kenaikan harga akibat penyesuaian harga BBM. Dengan Program keluarga harapan di harapkan masyarakat dapat terbantu Tetapi tujuan utama program Keluarga harapan adalah sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi di indonesia. Program Keluarga Harapan di Brebes dilaksanakan sejak tahun 2011 dan masih berlangsung hingga sekarang.

Kewajiban penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan diantaranya adalah berkaitan dengan pemeriksaan kandungan bai ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi bagibalita. Sedangkan di bidang pendidikan kewajiban penerima PKH terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah Dasar (SD) sampai ke sekolah Lanjutan (SMA/SMK). peserta PKH yang selanjutnya di sebut dengan Rumah Tangga/ Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) memiliki akses yang sangat baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gii termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dua manfaat yaitu manfaat jangka

panjang dan manfaat jangka pendek. Manfaat jangka panjang dari PKH adalah membeikan icame effect kepada RTSM/KSM dengan pengurangan beban rumah tangga. Sedangkan manfaat jangka panjang dari PKH adalah dengan PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antara generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan membeikan kepastian kepada si anak tentang masa depannya. Karena tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuuhan kesehatan dan pendidikan, untuk minimal sekalipun sehingga mempengaruhi kapasitas pendapatan anak di masa depan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Sebagian dari merka yang tidak bersekolah biasanya bekerja untuk membantu keluarganya. Program Keluarga Harapan merupakan program komitmen lembaga atau instansi terkait yang meliputi; Kementrian Sosial, Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, kementrian Agama, BPS, dan PT Pos Indonesia dan Lembaga Keuangan Perbankan dalam penyaluran bantuan bagi peserta PKH. Peran pemerintah daerah dalam memastikan kesediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan pendidikan sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan PKH ini sesuai komitmen yang sudah di tangani oleh masing - masing kepala daerah.

Tabel 2. Presentasi penduduk Miskin (P0) menurut Kabupaten /Kota (persen)

No.	Nama Wilayah	Tahun	
		2020	2021
1.	Cilacap	11,46	11,67
2.	Banyumas	13,26	13,66
3.	Purbalingga	15,90	16,24
4.	Banjarnegara	15,64	16,23
5.	Kebumen	17,59	17,83

6.	Purworejo	11,78	12,40
7.	Wonosobo	17,36	17,67
8.	Magelang	11,27	11,91
9.	Boyolali	10,18	10,62
10.	Klaten	12,89	13,49
11.	Sukoharjo	7,68	8,23
12.	Wonogiri	10,86	11,55
13.	Karanganyar	10,28	10,68
14.	Sragen	13,38	13,83
15.	Grobogan	12,46	12,74
16.	Blora	11,96	12,39
17.	Rembang	15,60	15,80
18.	Pati	10,08	10,
19.	Kudus	7,31	7,60
20.	Jepara	7,17	7,44
21.	Demak	12,54	12,92
22.	Semarang	7,51	7,82
23.	Temanggung	9,96	10,17
24.	Pemalang	16,02	16,56
25.	Kendal	9,99	10,24
26.	Batang	9,13	9,68
27.	Pekalongan	10,19	10,57
28.	Tegal	8,14	8,60
29.	Brebes	17,03	17,43
30.	Kota Magelang	7,58	7,75
31.	Kota Surakarta	9,03	9,40
32.	Kota Salatiga	4,94	5,14
33.	Kota Semarang	4,34	4,56
34.	Kota Pekalongan	7,17	7,59
35.	Kota Tegal	7,80	8,12

(Sumber ; BPS Jawa Tengah)

Kabupaten terluas ketiga di Provinsi Jawa tengah adalah Kabupaten Brebes dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa tengah yang wilayahnya terbagi kedalam 17 kecamatan, 5 kelurahan, dan 292 desa. Dan di kabupaten brebes sebanyak 17,03 persen jumlah penduduk termasuk kedalam kategori miskin di tahun 2020, dan di tahun 2021

sebanyak 17,43 persen jumlah penduduk Brebes termasuk kedalam kategor miskin. Kecamatan Paguyangan menjadi salah satu kecamatan termasuk dalam wilayah Kabupaten Brebes dengan tingkat penduduk miskin yang terbilang tinggi dan menjadi kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya menerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH). Salahsatu desa yang termasuk dalam Kecamatan Paguyangan yang memiliki tingkat angka penduduk miskin dan paling banyak menerima manfaat dari program PKH adalah Desa Winduaji. Desa Winduaji merupakan desa yang berada dalam lingkup wilayah Kecamatan Paguyangan yang sebagian besar penduduknya sampai saat ini banyak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2022. Dengan dimulainya program PKH yang diimplementasikan di Desa Winduaji sampai tahun 2022, tingkat angka kemiskinan di desa tersebut tergolong tinggi diantara desa-desa lainnya di Kecamatan Paguyangan, dikarenakan program PKH yang ada belum dapat berjalan secara optimal di masyarakat. Berikut disajikan data mengenai jumlah penerima PKH yang ada di Kecamatan Paguyangan Tahun 2022.

Tabel 3. Jumlah penerima PKH Kecamatan Paguyangan Tahap 1 Tahun 2022

No	Nama Desa	Jumlah
1.	Cilibur	343
2.	Cipetung	176
3.	Kedungoleng	723
4.	Kretek	622
5.	Pagojengan	518
6.	Paguyanga	384
7.	Pakujati	307
8.	Pandansari	633
9.	Ragatunjung	516
10.	Taraban	804
11.	Wanatirta	646
12.	Winduaji	840

Jumlah total	6552
---------------------	-------------

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah penerima PKH Desa Winduaji sebanyak 840 KPM. Desa Winduaji menjadi salah satu desa di kecamatan Paguyangan dan menjadi Desa yang terbanyak KPM PKH sekecamatan Paguyangan.

Pelaksanaan program PKH di Desa Winduaji sejak awal dilakukan memiliki kecenderungan pada data jumlah penerima program PKH disebutkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan terhadap jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tentu hal ini menjadi berbanding terbaik dengan harapan maupun tujuan yang akan dicapai dari adanya program PKH yakni menumbuhkan atau meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, berdasarkan kasus yang ada maka dapat disimpulkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di Desa Winduaji hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari program PKH belum dapat tercapai secara optimal dan menemukan kegagalan program yang dijalankan. Adapun model evaluasi yang digunakan dengan pendekatan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, Product*),(Stufflebeam,et.al,1967).

Pertama evaluasi konteks, yaitu melihat kesesuaian dan tujuan dari pelaksanaa program keluarga harapan (PKH), Kedua evaluasi masukan, yaitu melihat bagaimana komponen yang ada di dalamnya yang tugas dan fungsi UPPKH, tugas dan fungsi operator PKH, tugas dan fungsi pendamping, serta kepesertaan dalam PKH. Ketiga evaluasi proses, yaitu bagaimana proses program PKH dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan teknis sampai dengan proses pemberian bantuan. Keempat evaluasi hasil, yaitu melihat bagaimana evaluasi hasil ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan terhadap keseluruhan dampak atau manfaat dari suatu program PKH terhadap penerima manfaat yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM) maupun kelompok penerima manfaat (KPM).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode secara kualitatif melalui interaktif (B. Miles et al., 2014) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan ialah pendekatan deskriptif yang berbasis pada proses bentuk evaluasi dalam ini adalah mengenai Program Keluarga Harapan di Desa Winduaji, Kecamatan paguyangan, Kabupaten Brebes (B. Miles et al., 2014). Dalam penelitian ini teknik Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Teknik Pemilihan informan penelitian ini dengan teknik *purpose sampling* (Nathan & Scobell, 2012). Penelitian ini dalam Analisis data menggunakan analisis interaktif (B. Miles et al., 2014) yang mempunyai tujuan dalam menganalisis suatu penelitian pertama dan melakukan desain ekplanatori untuk menganalisis dalam penelitian kedua (Cresswell&cresswell 2018a). Sasaran informan penelitian ini terdiri berbagai komponenen masyarakat, pemerintah dan pihak swasta meliputi Unsur Pemerintah Desa Winduaji, Koordinator PKH Kecamatan Paguyangan, Pendamping PKH Desa Winduaji dan masyarakat penerima bantuan PKH. Pemilihan informan dilakukan dan dipilih secara *purpose sampling* sesuai kebutuhan penelitian yang akan dicapai (Cresswell&Cresswell. 2018a). Dalam penelitian ini Validitasi data menggunakan triangulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&Cresswell. 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Publik

Pembahasan mengenai suatu kajian dapat diuraikan secara bertahap melalui suatu pemahaman diperoleh dari suatu permasalahan ataupun perkembangan yang muncul dalam kolompok dengan melakukan menjadi berbagai proses seperti *agenda setting*, formulasi, legitimasi,

implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi (Lane1, et. Al. 2017). Dalam melakukan berbagai proses kebijakan diperlukan para aktor publik seperti lembaga pemerintah maupun swasta dan legislatif dalam menetapkan suatu tindakan yang akan dilakukan untuk masyarakat dalam kepentingan secara umum (Anderson, 2017). Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam sistem manajemen untuk menganalisis suatu program mengenai temuan-temuan yang muncul dilapangan (Lang, Jing & Yin, Runsheng. 2019). Hasil temuan penelitian dapat disampaikan secara terbuka mengenai informasi ataupun data yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari program. Tujuan adanya evaluasi menjadi salah satu proses yang mengarahkan suatu program untuk dilakukan dengan sistematis dan lebih fokus terhadap aspek-aspek dalam suatu program (Lemiaux dan Thomas. 2019). Prosed identifikasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan suatu program yang telah diimplementasikan menjadi salah satu langkah untuk melakukan proses evaluasi terhadap program (Liou, Chiun He. 2020). Penyampaian informasi dalam melakukan proses analisis evaluasi menjadi patokan utama dalam mengambil keputusan untuk menjaga komitmen dan peningkatan pola pikir terhadap pandangan pelaksanaan program. (Mustapha, Rafiu A. 2020).

Secara umum kebijakn yang dibuat oleh pemerintah memiliki nilai-nilai ataupun norma secara transparan dengan adil untuk melakukan proses evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan ketetapan regulasi dan prosedur yang ada dan tepat target sasaran pada objek program dalam mewujudkan keberhasilan program (Urooj & Parven. 2020). Fokus dalam dari analisis dampak menjadi salah satu solusi alternatif dalam menilai dan memastikan keberhasilan suatu program yang dijalankan dalam sebuah organisasi maupun kelompok yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan secara kuantitatif (Roberts, 2020). Ruang lingkup analisis terhadap program melalui evalusi kebijakan dapat dilengkapi dengan penilaian-penilaian bebagai jenis seperti penilaian

kinerja tingkat efektivitas kebijakan, penilaian pemahaman bersama, , penilaian cepat dan penilaian penerima manfaat, pemantauan indikator, dan bahkan survei pelacakan pengeluaran publik dalam konteks pengelolaan sektor publik (Abonor & Joy AE. 2020). Evaluasi dapat dijadikan sebagai fungsi pengawasan diluar program yang sangat berpengaruh terhadap kinerja aktor dalam melakukan program terhadap sasaran objek program. Secara umum evolusi dari proses evaluasi dampak melingkupi berbagai informasi dan data dan informasi yang ditemukan dilapangan secara relevan (Michael and Emmanuel, 2020).

Evaluasi terhadap kebijakan yang dilakukan menjadi salah satu tahapan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan program yang sifatnya mengenai kepentingan umum dimasyarakat dengan mengantisipasi berbagai faktor hambatan yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Dengan demikian para pemangku kebijakan ataupun pelaksana secara umum mempersiapkan antisipasi faktor hambatan yang dapat mempengaruhi suatu program (Leaung, et al. 2019). Dalam proses evaluasi biasanya dilakukan pada sistem politik. Proses evaluasi secara umum tertuju pada sistem politik, akan tetapi perlu adanya pendekatan secara khusus kepada masyarakat dalam segala aspek (Naderi, Samane & Akrami, Azam. 2020). Secara umum yang dilakukan pada kebijakan program melalui analisis evaluasi tertuju pada proses pada *Output* dan *Outcome* dari Program Keluarga Harapan secara komperensif terhadap proses pelaksanaan program PKH dimasyarakat (Nwagboso, Chris. 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH)

Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu program pemerintah dalam menghadapi masalah yang terus menerus berkembang secara bertahap dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang mampu mendorong pengurangan angka masalah (Sommers, Benjamin. 2020). Pembahasan mengenai masalah kemiskinan dengan upaya pembelakukan kebijakan oleh pemerintah dalam

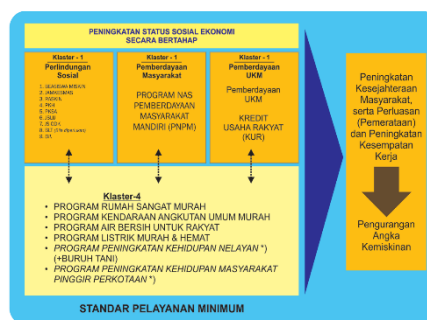
penanggulangan kemiskinan dimasyarakat, akan tetapi dari keseluruhan kebijakan yang ada belum bisa memberikan dampak lebih untuk masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu fenomena bersejarah yang tidak ada hentinya di masyarakat negara indonesia. Adanya masalah kemiskinan menimbulkan dampak bagi masyarakat dalam mengakses aspek aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan dan pencukupan kebutuhan sesuai dengan standart (Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla & Mbabazi Mbabazize. 2019). Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perbedaan level dan pemenuhan kebutuhannya modal produktif atau asset, sumber keuangan, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Leaung, et al. 2019). Artinya pemerintah secara langsung merespon masalah tersebut untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat melalui perlindungan sosial sebagai langkah dalam menanggulangi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat.

Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat menggunakan skema penyaluran sumber daya kebutuhan secara bertahap dengan tujuan meningkatkan standart hidup masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan yang masih kurang dengan mempertimbangkan target sasaran sesuai dengan kriteria atau kategori rumah tangga ataupun masyarakat yang masih mengalami kemiskinan (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020). Fokus skema penyerahan bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat yang mempunyai keterbelakang dalam memenuhi kebutuhan setiap anggota seperti keluarga yang miskin mempunyai anak, keluarga yang mempunyai anggota keluarga lanjut usia dan memiliki penghasilan yang minim. Secara umum program bantuan sosial dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam mengurugi masalah kemiskinan. Bantuan sosial yang diberikan dalam program bansos tidak tergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Secara umum bantuan sosial dapat disalurkan langsung kemasyarakat yang sifanya

mempunyai kerentanan dalam pemenuhan kebutuhan mulai dari bentuk uang, bentuk barang ataupun pelayanan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai wujud perlindungan sosial untuk masyarakat secara umum untuk mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah secara penuh dalam sektor sosial melalui pemberian bantuan sosial secara bersyarat kepada Keluarga yang tergolong dalam kategori Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dimulai dari sejak tahun 2007 sebagai upaya pengembangan sistem perlindungan sosial dalam lingkup masyarakat. (Kemensos, 2020) berikut gambar yang menunjukkan bahwa PKH berada pada kluster 1 dalam skema kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan.

Gambar 2. Skema Kebijakan Nasional Penanggulangan



(Sumber: Sahi, Nirmala Afrinti, Taufiqurokhman, And Andriansyah. 2019)

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial dan strategi intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mengadopsi Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfers) yang

sudah banyak diterapkan berbagai negara. Landasan hukum PKH adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam penelitian ini, Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 di Desa Winduaji dianalisis berdasarkan aspek konteks, masukan, proses dan hasil. Adapun hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu tujuan dari program PKH sudah sesuai dengan tujuan dari pemerintah diantaranya membantu meringankan beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan dasar dan peningkatan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, program PKH sudah selayaknya dapat dilanjutkan supaya tujuan dari Negara Indonesia dapat segera tercapai. Kebutuhan KPM di Desa Winduaji khususnya di bidang pendidikan masih kurang dikarenakan ada KPM yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dimana setiap bulannya ada iuran wajib yang harus dibayarkan, sedangkan kebutuhan di bidang kesehatan para KPM sudah merasa tercukupi karena mereka dapat berobat secara gratis di faskes yang telah ditentukan.

Respon penerima bantuan terhadap program yaitu menerima kehadiran program PKH dan mereka merasa senang karena dapat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal penyaluran bantuan masih mengalami kendala yaitu pada saat penyaluran dana bantuan dari pusat kadang belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi secara keseluruhan proses penyaluran dana bantuan PKH di Desa Winduaji sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis peneliti dan wawancara secara mendalam terkait komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH di Desa Winduaji dapat diketahui secara keseluruhan komitmen dan pola pikir peserta PKH harus didukung dengan sikap produktif secara sosial dan ekonomi.

Adapun model evaluasi yang digunakan terkait dengan evaluasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Winduaji yaitu model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), (Stufflebeam, et.al, 1967). Pertama evaluasi konteks, yaitu melihat kesesuaian dan tujuan dari pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), Kedua evaluasi masukan, yaitu melihat bagaimana komponen yang ada di dalamnya yang tugas dan fungsi UPPKH, tugas dan fungsi operator PKH, tugas dan fungsi pendamping, serta kepesertaan dalam PKH. Ketiga evaluasi proses, yaitu bagaimana proses program PKH dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan teknis sampai dengan proses pemberian bantuan. Keempat evaluasi hasil, yaitu melihat bagaimana evaluasi hasil ini digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dengan demikian, evaluasi ini diarahkan terhadap keseluruhan dampak atau manfaat dari suatu program PKH terhadap penerima manfaat yaitu rumah tangga sangat miskin (RTSM) maupun kelompok penerima manfaat (KPM).

1. Evaluasi Konteks

Berdasarkan hasil penelitian bahwa untuk menganalisis evaluasi konteks yaitu dengan melihat komponen dan aspek yang ada di dalamnya pertama yaitu tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) apakah sudah sesuai dengan tujuan, kedua dari kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program PKH diantaranya kebutuhan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan dan social ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian pada aspek evaluasi konteks ini peneliti menemukan bahwa dilihat dari sisi tujuan program, pelaksanaan program PKH di Desa Winduaji sudah sesuai karena program PKH yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan taraf hidup baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan, menciptakan perubahan perilaku (*mindset*) dan kemandirian KPM agar terbangun sikap hidup yang lebih produktif dan berdaya secara sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Saat ini sebagian besar para penerima manfaat dari PKH mulai dilatih untuk

mengembangkan berbagai usaha agar bantuan yang diberikan berubah dari pola konsumtif menjadi pola produktif.

Para pendamping juga sangat memiliki peran yang sangat besar dalam upaya perubahan pola hidup masyarakat para penerima manfaat. Meskipun juga masih ditemukan dari para penerima manfaat PKH masih bersikap kurang respon terkait dengan kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi. Mereka masih menganggap tidak perlu dan cukup mengandalkan bantuan PKH yang diterimanya selama ini, kondisi seperti ini yang menjadi salah satu faktor program PKH terus meningkat setiap tahunnya. Sebagaimana masyarakat penerima manfaat masih belum bisa merubah pola pikir dan pola hidup untuk jangka panjang.

Selain pola ekonomi yang dibangun, dalam pelaksanaan PKH di Desa Winduaji ini juga berupaya untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, terutama anak-anak dari para penerima manfaat PKH. Beberapa kelompok penerima manfaat PKH yang terpaksa harus menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dimana setiap bulannya ada iuran bulanan yang harus dibayarkan. Sedangkan pada bidang kesehatan para KPM sudah merasa tercukupi, dan sangat terbantu karena ketika sakit para KPM dapat berobat secara gratis di faskes yang sudah ditetapkan. Artinya, pelaksanaan program PKH di Desa Winduaji sudah mampu memberikan akses yang baik bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Sedangkan untuk aspek perbaikan ekonomi masih terus dilaksanakan untuk bisa secara bertahap membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan secara bertahap merubah pola pikir masyarakat untuk lebih bisa produktif dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui program keluarga harapan (PKH).

2. Evaluasi Masukan

Pada aspek evaluasi masukan untuk melihatnya menggunakan beberapa komponen ataupun sub aspek yang ada didalam suatu program PKH yang dilaksanakan di Desa Winduaji kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Berikut analisisnya mengenai aspek :

- a. Tugas dan fungsi UPPKH. Pelaksanaan Program PKH yang dilakukan di Desa Winduaji kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang telah ditetapkan dan secara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PKH setiap kali dilakukan.
- b. Tugas dan fungsi operator PKH. Pengelolaan terhadap data menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan seiring dengan banyaknya masyarakat yang mendapatkan program Keluarga harapan. Hal ini menjadi pelaporan tahunan yang dilakukan oleh dapat dilakukan oleh operator PKH sebagai sebagai wujud penugasannya.
- c. Tugas dan fungsi pendamping PKH.dalam pelaksanaan program tugas dan fungsi pendamping PKH untuk kelompok masyarakat untuk mendampingi pemanfaatan bantuan PKH agar dapat terkontrol dan memonitoring proses berjalannya PKH untuk mencapai suatu tujuan di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Perlu adanya sosialisasi mengenai pengembangan pemanfaatan bantuan PKH untuk merintis pembangunan ekonomi dalam segala bidang, yang nantinya dapat memberikan dorongan pada kemajuan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum Pelaksanaan pendampingan PKH dapat dilakukan rutin setiap bulannya yang diikuti oleh seluruh keluarga penerima dalam pertemuan terakhir, akan tetapi pendampingan PKH sempat

terhambat dengan adanya pandemi covid-19 sehingga diharuskan untuk tidak melakukan pertemuan dan pendampingan kepada kelompok masyarakat. Secara umum dengan adanya program ini mayoritas masyarakat sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Evaluasi Proses

Dalam menganalisis evaluasi program dapat dilakukan dengan aspek evaluasi proses dalam pelaksanaan bantuan PKH dimasyarakat yang dilakukan oleh pendamping dan KPM di dalam program. Untuk menganalisis evaluasi proses tersebut dapat dilakukan melalui komponen-komponen yang ada didalam program seperti:

a. Sosialisasi pelaksanaan PKH

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara rutin yang disertai dengan pendampingan untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan bantuan PKH dapat berjalan sesuai dengan procedural dan selalu dilaksanakan pengawasan dan monitoring oleh para pendamping PKH.

b. Proses pendampingan dalam PKH

Proses pendampingan PKH dilakukan bersama kelompok penerima manfaat sebagai fungsi media pengarah dan mengedukasi masyarakat pemanfaatan dan pembinaan terhadap penggunaan bantuan yang diperolehnya untuk kepentingan keluarga yang dikelola secara efektif dan efisien.

c. Pengelolaan data PKH

Pengelolaan data KPM PKH masih dalam kondisi belum terupdate sehingga masih kurang sinkron terhadap kondisi data dilapangan yang mengakibatkan para penerima bantuan belum bisa menerima sesuai dengan jadwal yang ada, sehingga perlu adanya pemutakhiran data yang terbaru untuk memperoleh informasi

mengenai kelompok penerima manfaat pada program keluarga harapan.

d. Pemenuhan komitmen peserta PKH

Menganai pemenuhan komitmen peserta PKH para KPM secara umum mampu menjalankan hak dan kewajiban salah satunya melakukan pertemuan secara rutin, menghadiri sosialisasi dan agenda-agenda lainnya mengenai pembahasan program keluarga harapan secara luas.

Secara umum proses pelaksanaan program PKH di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes ada beberapa hal yang masih harus perlu menjadi perhatian seperti pada pendampingan, sosialisasi dan edukasi, komitmen KPM dapat berjalan dengan efektif dan efisien dimasyarakat. Adanya Pendamping program untuk masyarakat menjadi salah satu langkah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dilapangan.

4. Evaluasi Hasil

Dalam menganalisa program keluarga harapan melalui aspek evaluasi hasil untuk menindaklanjuti informasi maupun fakta yang ditemukan untuk dasar mengambil keputusan. Evaluasi hasil umumnya digunakan untuk mengarahkan suatu program yang dilaksanakan agar dapat mencapai hasil dari tujuan program PKH terhadap RTSM/KPM. Untuk menganalisis evaluasi hasil ini diperlukan berbagai komponen-komponen yang ada didalamnya seperti:

a. Komitmen dan Perubahan Pola Pikir (*mindset*) Peserta PKH

Terbentuknya sikap komitmen dan pemahaman terhadap pola pikir peserta PKH mengenai tujuan dari program dapat mendorong dan membantu mewujudkan capaian suatu hasil yang diharapkan dari adanya program. Pergerakan yang meningkat akan membawa

perubahan yang besar terhadap kemajuan masyarakat dalam berfikir dan bertindak seiring dengan perkembangan yang sulit dihadapi. Melalui program PKH memberikan dobrakan bagi masyarakat untuk senantiasa berusaha keluar dari masalah kemiskinan dan menciptakan komitmen terhadap peningkatan ekonomi keluarga.

b. Tertib Administrasi Data PKH

Tertibnya administrasi data peserta PKH menjadi langkah pengelolaan program dapat berjalan dengan dinamis dan berkelanjutan. Data administrasi menjadi hal penting untuk memantau perkembangan pelaksanaan program dan sebagai sumber informasi dan fakta sebagai langkah kedepan bagi pemerintah dalam bertindak mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat umum. dengan kondisi kelompok penerima masyarakat dalam program PKH.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes secara umum dapat membantu kebutuhan baik bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan maupun bidang kesehatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya. Evaluasi yang dilakukan bertujuan dapat memberikan pandangan masyarakat untuk terus berusaha meningkatkan khususnya dalam sektor ekonomi yaitu mencapai titik kesejahteraan secara mandiri di masyarakat. Adanya proses evaluasi program PKH ini perlu dilakukan pemutakhiran data agar program PKH ini sesuai dan tujuan dan tepat sasaran untuk masyarakat miskin.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, maka dapat diperoleh kesimpulan menjadi empat komponen yakni, evaluasi *context* (konteks)

yang selama ini berjalan terkait dengan teknis aturan harus lebih di tingkatkan pengawasan oleh para pendamping agar mampu mencapai kebutuhan yang sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan, materi modul sehingga mayoritas KPM sudah mengetahui mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki tujuan program kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi *input* (masukan) harus mampu melaksanakan monitoring dan pembinaan bagi para kelompok penerima manfaat agar mampu membangun pola hidup yang produktif, Evaluasi *process* (proses) dan Evaluasi *product* (hasil) selama ini yang berjalan masih harus ditingkatkan dengan upaya pelatihan dan ketrampilan agar para kelompok penerima manfaat lebih berdaya dalam hal sosial dan ekonomi. Selanjutnya perlu adanya pelaksanaan pemutakhiran data secara berkala, karena masih ada penerima bantuan PKH yang menerima bantuan belum sesuai dengan kondisi terkini, dan masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari PKH, pendamping PKH perlu mengedukasi kembali masyarakat terkait dengan pendidikan kewirausahaan dan pola hidup yang lebih produktif untuk mencapai masyarakat yang mandiri, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiafi, Patoae Roberts, 2020. "The Nature of Public Policy Processes in The Pasific Island", Asia & The Pasific Public Studies.Vol 4,No.3,Pp 451-466
- Ali, Huma, Urooj Islam, & Shabnan Parven. 2020. "Impact of Green Human Resource Management Practices on Job Seekers' Attraction", Journal of Resources Development and Management,Vol 38, No.1,Pp 26 -32
- Andersson Annika Lantz et.al. 2015. What's the problem? Meaning making and learning to do mathematical word problems in the

context of digital tools Annika. Published online: 25 January 2008.
Department of Education, LinCS, Goteborg University,300, 405 30
Goteborg, Sweden.

Augustine, E Bassey, Lazarus B, Abonor & Joy AE. 2020. "The Impact of Female Genital Mutilation (FGM) on Hemorrhage During Child Birth Among Rural Women of Cross River State", Information and Knowledge Management, Vol 7, No.11,Pp 1 – 13

Babatunde, Binoyo. 2019."Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics Development Evidence from Nigeria." Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter), Vol 4, No 1,Pp 26 -37

Baghebo, Michael & Nathan, Emmanuel. 2019."The Impact of Poverty Alleviation Programmes on Economic Growth in Nigeria 1981 – 2013". International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No 10 Pp 177 – 188

Creswell, R. 2019. Research Design, Qualitative, Quantitaive and Mixed Method Approaches, "Sage Journal"

Derrick and White, P. 2020 . Comparing two samples from an individual Likert question. "International Journal of Mathematics and Statistics" , 18 (3).

Declan. 2020. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire Compared to Calibrated Accelerometer cut off points in the Quantifications of Sedentary Behaviour and Physical activity in Older Adults." Journal PONE", Vol 1 No 9

Karimi, Milad & Brazier, John. 2020."Health, Health-Related Quality of Life, and Quality of Life: What is the Difference?".The Journal of Applied Laboratory Medicine.Pp 1-9

- Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla & Mbabazi Mbabazize. 2019. Effect of Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda, "The International Journal Of Business & Management", Vol 4 No 4
- Korankye, Alex Adde. 2019. "Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature." American International Journal of Social Science, Vol. 3, No.7, Pp 147 - 153
- Kwong, Yan Wai. 2019. "A Review of the Impacts of Agenda-sett." Journal of Communication and Education." Vol 2, No.2
- Lang, Jing & Yin, Runsheng. 2019. "Research Trends : Policy Impact Evaluation, Future Contributions From Economics", Journal Policy and Economics, Vol 8, No.2, Pp 142-145
- Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe. (2017). Non-profit organizations in public policy implementation. Journal of public administration and policy research Vol. 1(7) pp. 141-149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.
- Lemiaux, Thomas. 2019. "Ineffective Effect of Social Assistance : A Regression Discontinuity Approach." Journal Of Econometric
- Leaung, et al. 2019. "Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California". American Journal of Public Health, Vol 105, No.8
- Leung, Lawrence. 2019. Validity, Reliability and Generalizability in Qualitative Research. "Research and audit Journal ", Vol 4 Issue 3
- Liou, Chiun He. 2020. "Child Poverty and its Impacts on Social Exclusion in Taiwan." Journal of Asian Public Policy, Vol 10, No.12

- Morgan, D. L. 2017. Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. In Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. <https://doi.org/10.4135/9781544304533>
- Mustapha, Rafiu A. 2020." Impact of poverty reduction program of the kwara state government of nigeria on the beneficiaries". International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom, Vol 5, No.3, March 2017, Pp 247 – 262
- Nathan, A. J., & Scobell, A. 2019. Experience sampling method: Measuring the quality of everyday life. In Foreign Affairs (Vol. 91, Issue 5).
- Naderi, Samane & Akrami, Azam. 2020. EFL Learners' Reading Comprehension Development through MALL:Telegram Groups in Focus," International Journal of Instruction", Vol 1 No 2 Pp 339 -350
- Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020. "Poverty Reduction for Sustainable Development: Malaysia's Evidence-Based Solutions". Global Journal of Social Sciences Studies, Vol. 3, No. 1, Pp 29 – 42.
- Nwagboso, Chris. 2019. "Public Policy and the Challenges of Policy Evaluation in the Third World ". British Journal of Humanities and Social Sciences Vol 5, No.1, Pp 59-76
- Sommers, Benjamin. 2020. Health Insurance Coverage and Health What the Recent Evidence Tell Us" The New England Journal of Medicine, Vol 20
- Theofilau, Paraskevi. 2019. "Quality of Life: Definition and Measurement. " Europe's Journal of Psychology , Vol 9 Issue 1, Pp 150 – 163.

- Wilson, Ron & Brend De Mast. 2019. "Housing Programs, Assisted Populations, and Crime: Guest Editors' Introduction". *Cityscape: A Journal of Policy Development and Research*, Vol 15, No. 3
- Yu, Stan & McLaughlin, Darrell Arthur. 2019. "Program Evaluation and Impact Assessment in International Non Governmental organizations (INGOs) : Exploring Rules, Benefits, and Challenges". *Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research*, Vol 4, No.2, Pp 23-36